

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Page | 1

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Republik Indonesia terus bekerja keras untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam pengembangannya, salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan adalah dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana. Dan tidak kalah penting, pembangunan pariwisata harus berbasis pemberdayaan masyarakat, yang mana pemberdayaan ini diharapkan dapat mengadopsi sistem yang utuh dan berkelanjutan.¹

Indonesia memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata. Ragam potensi pariwisata tersebut antara lain: 1) Kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional, 2) Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah dan destinasi, 3) Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif, dan 4) Atensi dan sikap masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan.² Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia juga menegaskan bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki empat (4) potensi yang dapat menjadi kekuatan bangsa dalam pengembangan pariwisata, yaitu: 1) Indonesia memiliki keragaman budaya dan sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, 2) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku kuliner dan kriya, 3) Bonus demografi, dan 4) konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar.³ Potensi-potensi ini dapat dijadikan sebagai modal awal untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan

¹ <https://www.kemenparekraf.go.id>, 13/09/2021

² Syarifuddin dan Basri. *Halal Tourism in Perspective of Islamic Economic Law and Its Prospects in Indonesia*. (Makassar: University of Makassar, 2020), h. 163-173

³ [Kemenparekraf.go.id](https://www.kemenparekraf.go.id), 13/9/2021

memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.⁴

Berhubungan dengan hal tersebut, Sumatera Utara juga merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.⁵

Dalam mengurus segala sesuatu yang terkait dengan pariwisata, Pemerintah membentuk Dinas Pariwisata. Dinas ini adalah suatu badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sektor pariwisata inilah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah yang salah satunya bersumber dari pendapatan masyarakat.

Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesiaini didukung dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisatayangmenyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatudaerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya PendapatanAsli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluasesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikanalam dan budaya setempat.⁶ Oleh karena itu, berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyakmanfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun,jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justruakan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkanmerugikan masyarakat.

⁴UU RI Nomor 10 Tahun 2009

⁵Jaelani, Aan. *Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h. 1-22

⁶UU Nomor 10 Tahun 2009

Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk mengembangkan kepariwisataan dibutuhkan keterkaitan 3 (tiga) *Stakeholder* utama yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiga elemen tersebut harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dari pengembangan kepariwisataan.⁷ Oleh karena itu, upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta sangat membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. SDM di sektor pariwisata merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (*service-based organization*), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja.⁸

SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (*tourist*) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.⁹

Sebagai upaya untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat, pemerintah berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan semua pihak terhadap pengembangan sektor kepariwisataan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal untuk

⁷Rayendra, Miko. *Halal Tourism Development in East Lombok Regency*. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2017) Vol 1, No. 2. h. 197-201

⁸Setiawan, Rony. *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang*. (Blitar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar, 2016), h. 23-35

⁹Setiawan, Rony. *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang*. (Blitar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar, 2016), h: 23-35

mengatasi keadaan tersebut adalah memberikan informasi dan pelatihan terhadap masyarakat tentang kepariwisataan yaitu dengan kegiatan sosialisasi mengenai kepariwisataan.¹⁰

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu sektor pariwisata yang potensial untuk dikelola, dikembangkan serta disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Kabupaten Mandailing Natal sedikitnya memiliki 150 destinasi wisata hampir di setiap kecamatan. Destinasi tersebut terdiri atas, wisata alam, wisata legenda, budaya, dan wisata religi.¹¹ Selain itu, Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai sebutan yang unik dan membuatnya menjadi berbeda dengan tempat-tempat wisata lainnya yaitu disebut sebagai “*Bumi Gordang Sambilan*”. Wisata alam yang dimiliki Mandailing Natal ini sangat luar biasa bila dibandingkan dengan daerah lain, sebab dari fotografi daerahnya, tempat wisata tersebut mempunyai daya tarik pariwisata yang bervariasi.

Namun, setelah dilakukan peninjauan lebih jauh keadaan pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat bahwa objek pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal khususnya daerah pantai, dari 100%, hanya 35% yang telah dikelola sedangkan 65% lagi masih utuh secara alami dan belum dikelola oleh pihak pemerintah daerah.¹² Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk segera mengelola berbagai potensi pariwisata yang ada tersebut dengan harapan dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal. Berhubungan dengan hal tersebut, seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mandailing Natal memiliki topografi yang bervariasi. Hal ini dimulai dari Sampuraga, Air Panas Sibanggor, Pantai Natal, Pantai Batu Rusa, Taman Nasional batang Gadis, Payabulan, Gunung Sorik Merapi, Desa Tradisional Sibanggor, Sopotinjak, bukit Sikara-Kara, Air Terjun Sigala-Gala, Pulau tamang, Pulau Ungeh, Bukit Muhasabah, Danau Pondok limo, dan Taman Rajabatu.

¹⁰ dispar.madina.go.id, 12/09/2021

¹¹ Jawapos.com, 13/9/2021

¹² Digilib.unimed.ac.id (Ika Purnama Sari, 2018), 12/09/2021

Karena itu, tidaklah mengherankan Mandailing Natal menyimpan potensi wisata yang sangat menarik. Terdapat lebih kurang 64 objek wisata di Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) maupun dikelola oleh masyarakat. Dibawah ini merupakan data jumlah obyek Pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 :

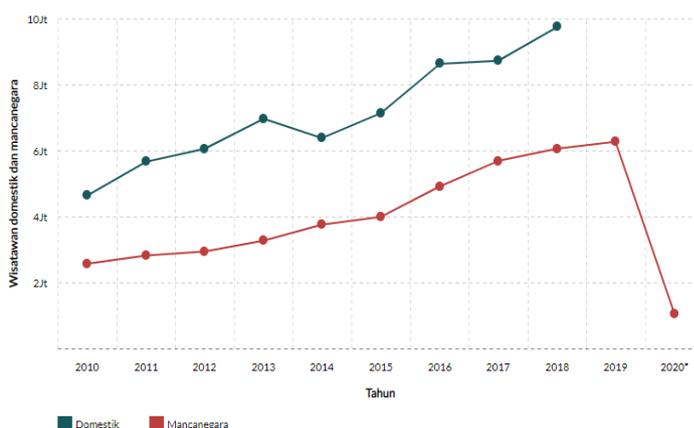
Tabel 1.1
Jumlah Obyek Wisata Di Kabupaten Mandailing Natal

No	Jenis Wisata	Jumlah
1	Wisata Bahari	31
2	Wisata Tirta	18
3	Wisata Buatan	2
4	Wisata Alam	14
5	Wisata Renang	7

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal (Data Diolah 2020)

Berdasarkan tabel di atas maka bukan tidak mungkin lagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk dapat membuat potensi pariwisatanya dikembangkan dengan cara mengelolanya menjadi lebih baik dan dijadikan salah satu potensi yang menarik sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Kabupaten Mandailing Natal ini mempunyai destinasi objek wisata yang cukup banyak yang berhubungan dengan wisata alam sehingga diminati oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing, pada tabel dibawah terlihat jelas penurunan, yang awalnya naik dan stop di 2019, dan melonjak turun di tahun 2020 yang terus menurun dengan data sebagai berikut :



Gambar 1.1
Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kab. Mandailing Natal

Mengutip dari website BPS kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa total pendapatan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 adalah sebesar 1,609 triliun rupiah. Penyumbang terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar 1,272 triliun rupiah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 52,00 miliar rupiah. Artinya, sektor pariwisata bukan merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, namun dapat berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal pada tabel di bawah ini:¹³

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Jumlah PAD
2016	Rp 32.714.421.073
2017	Rp 22.507.697.780
2018	Rp 22.488.697.780
2019	Rp 28.177.617,87
2020	Rp 23.712.889,21

Sumber: BPS Mandailing Natal

¹³Website: BPS Kab. Mandailing Natal, 12/09/2021

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun 5 tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Mandailing Natal, secara umum mengalami fluktuasi yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 32.714.421.073,25 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 dengan jumlah Rp. 22.507.697.780,02. Selain itu, pada 2018 ke 2019, terjadi penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2018, Mandailing Natal memiliki pendapatan asli daerah sebesar Rp. 22.488.697.780,02, sedangkan pada 2019 hanya Rp. 28.177.617,87, dan ditahun 2020 hanya 25..220.518,80. Data tersebut, membuktikan kepada kita bahwa pendapatan asli daerah Mandailing Natal mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Selain itu, angka penurunan lainnya juga dapat ditemukan pada usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Mandailing Natal. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mandailing Natal, tingkat penghunian kamar di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2020, secara rata-rata sebanyak 14,05 persen kamar yang dihuni oleh tamu dengan rata-rata lama inap dua sampai tiga hari. Sedangkan, pada tahun 2017 hingga 2019, tingkat penghunian kamar sebanyak 23,05 persen tahun 2017, sebanyak 16,26 persen tahun 2018, dan sebanyak 16,38 persen tahun 2019.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa objek wisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar belum memiliki prasarana yang memadai. Masalah prasarana yang sering menjadi keluhan yaitu prasaranaperhubungan belum bagus dan masih terdapat kerusakan serta harus melewati jalansetapak. Kemudian, masalah lain yaitu masih sedikittransportasi umum menuju objek wisata, yang ada hanya mobil pribadi dan motorsehingga

¹⁴Mandailingnataalkab.bps.go.id, 13/9/2021

sulit dijangkau oleh masyarakat apalagi wisatawan mancanegara¹⁵. Selain itu, wisatawan juga mengalami kesulitan untuk menemukan tempat makan dan penginapan yang memadai.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Mandailing Natal tersebut antara lain :

1. Kurangnya Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dengan Masyarakat setempat sehingga proses pengelolaan & pengembangan potensi pariwisata kurang efisien.
2. kurangnya pendanaan yang diberikan dinas Pariwisata kepada pihak objek pengelola (masyarakat).
3. kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam yang ada di tempat pariwisata tersebut.

Melihat keadaan tersebut, sektor pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal perlu mendapat sorotan, mengingat banyaknya potensi objek wisata yang menarik di Kabupaten Mandailing Natal¹⁶. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi yang matang yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di sektor pariwisata.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata seyogyanya harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan yang berarti bahwa pengelolaan dan pengembangan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi serta tidak melanggar norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Pengelola pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁵Habibah. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Objek Wisata Danau Marambe Kabupaten Mandailing Natal. (Padang: Jurusan Pariwisata, Universitas Negeri Padang, 2016)

¹⁶Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat , 18/10/2021

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁷

Kandungan surat diatas menegaskan bahwa selain beribadah kepada Allah SWT., manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya khususnya manusia. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan semua makhluk-Nya khususnya manusia sebagaimana penjelasan surat Al- A'raf ayat 56 di atas.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Habibah¹⁸ penelitian ini fokus untuk menentukan strategi pengembangan prasarana dan sarana yang mempunyai indikator internal berupa kekuatan dan kelemahan sedangkan indikator eksternal berupa peluang dan ancaman. Rayendra¹⁹, Palupi, Romadhon dan Arifan²⁰ pada penelitian ini menyoroti alasan yang mendasari pengembangan wisata halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan wisata serta untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap kesiapan wisata halal.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya

¹⁷Tafsirweb.com, 13/09/2021

¹⁸Habibah. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Objek Wisata Danau Marambe Kabupaten Mandailing Natal. (Padang: Jurusan Pariwisata, Universitas Negeri Padang, 2016)

¹⁹Rayendra, Miko. Halal Tourism Development in East Lombok Regency. Padang: Universitas Negeri Padang Vol 1, No. 2. h. 197-201 ISSN 2580-1775. 2017.

²⁰Palupi, Romadhon dan Arifan. The Importance of Optimization of Halal Tourism: A Study of The Development of Halal Tourism in Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, h. 1-10. 2017.

manusia (SDM) di Kabupaten Mandailing Natal yang akan ditinjau menurut perspektif ekonomi islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alamsemesta demi kesejahteraan bersama. Keberadaan objek wisata akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluasesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikanalam dan budaya setempat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya dinas pariwisata Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat setempat untuk mengoptimalkan objek wisata serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berkembangnya daerah wisata tersebut. Untuk itu, peneleitian ini mengangkat judul: **“Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada latar belakang masalah penelitian ini. Terdapat beberapa masalah yang perlu dikembangkan dalam studi ini. Masalah-masalah yang dimaksud adalah:

1. Terdapat penurunan-penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal yang signifikan. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 32.714.421.073,25 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 dengan jumlah Rp. 22.507.697.780,02. Selain itu, pada 2018 ke 2019, terjadi penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2018, Mandailing Natal memiliki pendapatan asli daerah sebesar Rp. 22.488.697.780,02, sedangkan pada 2019 hanya Rp. 28.177.617,87, dan ditahun 2020 hanya Rp. 25.220.518,80.
2. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa objek wisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar belum memiliki prasarana yang memadai. Masalah prasarana yang sering menjadi keluhan yaitu prasaranaperhubungan belum bagus, masih sedikit, dan masih

terdapat kerusakan serta harus melewati jalansetapak. Kemudian, masalah lain yaitu masih sebagian kecil transportasi umum menuju objek wisata, yang ada hanya mobil pribadi dan motor sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat apalagi wisatawan mancanegara²¹.

3. Angka penyediaan akomodasi di Kabupaten Mandailing Natal juga mengalami penurunan. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mandailing Natal, tingkat penghunian kamar di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2020, secara rata-rata sebanyak 14,05 persen kamar yang dihuni oleh tamu dengan rata-rata lama inap dua sampai tiga hari. Sedangkan, pada tahun 2017 hingga 2019, tingkat penghunian kamar sebanyak 23,05 persen tahun 2017, sebanyak 16,26 persen tahun 2018, dan sebanyak 16,38 persen tahun 2019.²²

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan analisis strategi pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat daerah Mandailing Natal?

²¹Habibah. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Objek Wisata Danau Marambe Kabupaten Mandailing Natal. (Padang: Jurusan Pariwisata, Universitas Negeri Padang, 2016)

²²Mandailingnata.kab.bps.go.id, 13/9/2021

2. Bagaimana peluang, kelemahan, kekuatan dan tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana strategi prioritas pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat daerah di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui peluang, kelemahan, kekuatan dan tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif ekonomi Islam.

Dan adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kabupaten Mandailing Natal dan daerah daerah lainnya dalam menyusun strategi pariwisata tersebut. Penelitian ini juga bisa menambah referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan Sebagai informasi ilmiah dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bagi Pihak Akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian, pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik lagi bagi penelitian sebelumnya